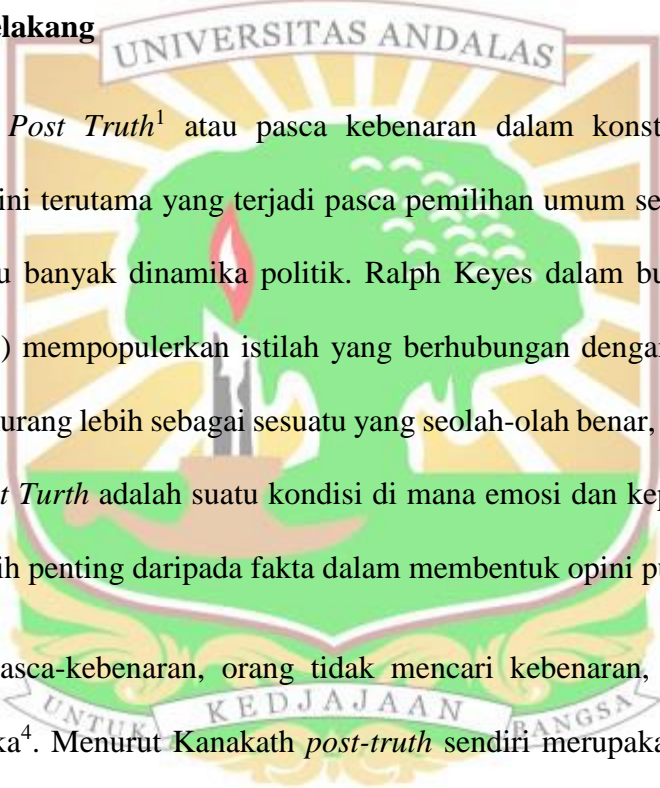


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Fenomena *Post Truth*¹ atau pasca kebenaran dalam konstelasi politik dan demokrasi² saat ini terutama yang terjadi pasca pemilihan umum serentak 2019 yang akhirnya memicu banyak dinamika politik. Ralph Keyes dalam bukunya *The Post-Truth Era* (2004) mempopulerkan istilah yang berhubungan dengan *post-truth* yaitu truthiness yang kurang lebih sebagai sesuatu yang seolah-olah benar, meski tidak benar sama sekali. *Post Truth* adalah suatu kondisi di mana emosi dan kepercayaan pribadi lebih banyak lebih penting daripada fakta dalam membentuk opini publik.³

Di era pasca-kebenaran, orang tidak mencari kebenaran, tetapi penegasan keyakinan mereka⁴. Menurut Kanakath *post-truth* sendiri merupakan kata sifat yang mengacu pada budaya (khususnya politik), dimana argumen dan keputusan dibuat berdasarkan daya tarik emosional sehingga fakta menjadi tidak berpengaruh, maka

¹Fenomena Post Truth adalah suatu kondisi masa dimana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal, Steve Tesich di majalah The Nation 1992

²Demokrasi didefinisikan Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat atau government of the people, by the people, and for the people (dalam Henry Priyono, et al., 2012). Perkembangan demokrasi pada dua dekade terakhir sangatlah cukup signifikan dari 187 negara saat ini di dunia, lebih dari 58 persen diantaranya mengadopsi sistem pemerintahan demokrastis ini. Kecenderungan ini menguat setelah jatuhnya sistem pemerintahan komunis pada akhir Tahun 80-an, yang mengakibatkan demokrasi menjadi satu-satunya alternatif yang sah terhadap berbagai bentuk dari regim otoritarian dalam (Andy Ramses & La Bakry, 2009)

³Ralph Keyes .2004. *Post Truth Era*,hal 15-19

⁴Eriyanto, 2012, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, hlm.2

kaitannya dengan jalannya demokrasi prosedural adalah dimana pemilihan umum adalah hal yang rutin atau suatu prosedur pasti yang terjadi di dalam negara yang menganut paham atau sistem politik demokrasi, tetapi yang menjadi fenomena tersendiri dalam jalannya pemilihan umum 2019 adalah dimana pengaruh *post truth* yang bisa dikatakan mewarnai jalannya konstelasi politik tersebut.

Hal yang tentunya menjadi menarik adalah dimana kaitannya dengan jalannya perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat yang mengakibatkan penyebaran informasi yang begitu cepat dan luas, maka dari itu pembentukan opini publik melalui penyebaran informasi ini semakin besar yang arahnya dijadikan alat politik. Dewasa ini penggunaan teknologi berbasis media sosial sangat besar dimana muncul pergeseran para aktor politik untuk melakukan sosialisasi visi dan misinya di media sosial. Hal ini yang akhirnya memunculkan fenomena *Post Truth*⁵ yang akhirnya mempengaruhi hampir seluruh sendi kehidupan manusia. Dapat dilihat dari berbagai gerakan yang muncul di hampir seluruh penjuru dunia mulai dari Inggris dan Amerika Serikat yang mengakibatkan kemunculan gerakan populisme yang masif.⁶

⁵ Fenomena *post truth* ini bukanlah fenomena nasional tetapi juga merupakan fenomena yang sudah mengglobal dimana bisa dilihat dari berbagai peristiwa di dunia dimulai dengan pemungutan suara saat *brexit* (*british exit*) pada 23 Juni 2016 menjadi momen pertama dimana terdapat lonjakan frekuensi penggunaan istilah *post-truth*. Frekuensi ini semakin menguat lagi pada bulan Juli ketika Donald Trump menjadi nominasi calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik hingga pada momen pemilihan presiden Amerika Serikat pada 8 November 2016. Hal yang tentu bisa peneliti lihat adalah adanya efek domino dari peristiwa tersebut ke berbagai penjuru dunia yang tentu juga memiliki pengaruh kepada konstelasi politik yang terjadi di Indonesia sendiri.

⁶ Kedua fenomena yang terjadi di dua belahan dunia yaitu di Inggris dan juga Amerika Serikat terlihat bahwa tidak lepas dari berkembangnya gerakan populis atau paham ideologi populisme di masyarakat hal ini terjadi diakibatkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap jalannya proses demokrasi dimana justru menimbulkan ketimpangan diberbagai sektor kehidupan mulai dari politik dan ekonomi. Hal ini

Hal ini diperparah dengan tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah contohnya sumber daya alam dikuasi oleh korporasi dimana pemerintah akhirnya malah melahirkan kebijakan yang pro terhadap kepentingan korporasi dan pemodal yang merugikan kepentingan nasional.⁷

Presiden Kamus Oxford, Casper Grathwohl menyatakan bahwa *post truth* masih akan menjadi hal yang akan terus dibicarakan, ini dikarenakan percakapan dunia didominasi oleh wacana politik dan diskursus yang dipicu oleh meningkatnya signifikansi media sosial sebagai sumber berita dan dibarengi dengan semakin besarnya ketidakpercayaan terhadap fakta dan data yang disajikan oleh institusi terkait maupun media massa.⁸ Hal yang tentu menjadi pertanyaan hari ini adalah bagaimana *post truth* juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jalannya pemilihan umum serentak 2019 kemarin, hal ini tentu menjadi perhatian peneliti dan juga kita semua bahwa dirujuk dari pengertian *post truth* itu sendiri maka akan terasa bahwa fenomena *post truth* memang terjadi di Indonesia, dan yang paling kentara terjadi di wilayah Sumatra Barat, hal ini bukan terjadi tanpa alasan dimana dapat dilihat dari

akhirnya menjadi sebuah gerakan sosial dimana masyarakat yang merasa sudah tidak percaya dengan elit politik meluapkan rasa protesnya terhadap segala kebijakan politis yang akhirnya memunculkan sifat yang konservatif dan anti demokrasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi semakin terdegradasi hal ini juga akhirnya memunculkan banyak tokoh populis yang akhirnya mendapatkan simpati dari masyarakat dimana terbukti dengan kasus yang sudah di jelaskan sebelumnya yang erat kaitannya dengan fenomena *post truth*. Dimana salah satu dari bagian jalannya fenomena *post truth* adalah adanya gerakan populisme di masyarakat yang kecenderungannya kearah pemikiran tertutup dan anti-keberagaman.

⁷Eko Wahyono, Rizka Amalia, Ikma Citra Ranteallo. 2017. Menelaah Lebih Dekat “Post Factual/Post Truth Politics, Studi Kasus Brexit” (Analsis Resensi Media) *Journal of Communication (Nyimak)*,1(1),hal 1-10

⁸Kharisma Dhimas Syuhada. 2017. Etika Media di Era “Post-Truth” *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 5(1), hal 1-6

pemilihan presiden 2014 dan 2019 dimana Joko Widodo yang dinyatakan terpilih di dua priode pemilihan presiden ini tetap saja kalah dengan signifikansi yang sangat besar di Sumatera Barat. Fenomena *post truth* yang ingin peneliti teliti ini bukanlah peristiwa *post truth* awal yang ada di Indonesia, tetapi adalah lanjutan dari peristiwa dari fenomena-fenomena yang telah terjadi sebelumnya, salah satunya adalah gerakan masyarakat islam untuk menurunkan AHOK sebagai gubernur DKI Jakarta.⁹

Menurut Eko Sulistyio ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya fenomena *post truth* di Indonesia khususnya dalam jalannya konstelasi politik 2019.¹⁰ Dimana ia menjelaskan bahwa yang pertama adalah, kemajuan teknologi informasi yang tidak diimbangi oleh kapasitas adaptasi pemerintah dan masyarakat, maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa bagaimana respon masyarakat bahkan pemerintah dalam fenomena *Post Truth* hari ini kurang adaptif dan kongret yang akhirnya malah semakin menenggelamkan dinamika politik kearah fenomena *Post Truth*.

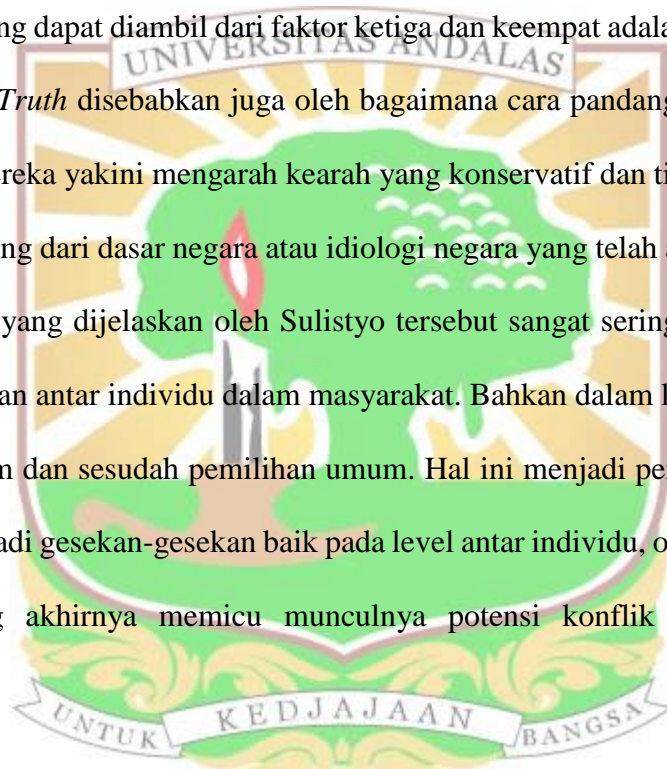
Kedua munculnya kompetisi politik yang terus berkepanjangan sejak pemilihan presiden 2014, hal ini termasuk kedalam faktor, dikarenakan dapat dilihat bagaimana calon presiden 2014 dan 2019 tidak lah terlalu berbeda dan bahkan berasal dari latar

⁹Tetapi fenomena post truth terbesar yang dapat lihat terjadi di Indonesia adalah peristiwa atau gerakan masyarakat islam untuk menurunkan AHOK sebagai gubernur DKI Jakarta dimana sikap reaktif masyarakat di era post truth ini ditunjukkan semakin jelas dengan munculnya serangkaian gerakan aksi bela islam yang berjalan bergelombang dan terus menerus dilancarkan yang dimulai pada 14 Oktober 2016 yang disebut sebagai aksi 1410. Tidak berselang lama aksi lanjutan terus berlangsung hingga muncul gerakan aksi lain seperti aksi 411, 212, 112, 212 Jilid II, 313 dan 55. Ketujuh rangkaian aksi bela Islam tersebut bertujuan untuk memenjarakan mantan gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

¹⁰Rizaldi Parani, Astrid Pramesuari, Daffa Muhammad Maldiva, Edlyn Felicia. 2018. Mempertanyakan Kembali Bhinneka Tunggal Ika Di Era Post Truth Melalui Media Sosial *Jurnal Lontar*” .6(2), hal 1-8

belakang partai yang sama dengan sebelumnya. Bisa kita lihat, aktor yang bertarung dalam konstilasi politik tersebut tetaplah kelompok atau individu yang sama. Maka hal yang terjadi adalah lanjutan dari kompetisi dari priode sebelumnya.

Ketiga, adanya dukungan dari masyarakat terhadap idiologi ekstrim serta yang keempat adanya kegelisahan terhadap perubahan dan perbaikan sistem yang dilakukan saat ini. Poin yang dapat diambil dari faktor ketiga dan keempat adalah bahwa jalannya fenomena *Post Truth* disebabkan juga oleh bagaimana cara pandang masyarakat atau idiologi yang mereka yakini mengarah kearah yang konservatif dan tidak rasional yang bahkan melenceng dari dasar negara atau idiologi negara yang telah ada. Maka dari itu keempat faktor yang dijelaskan oleh Sulistyoyo tersebut sangat sering terjadi di dalam konteks hubungan antar individu dalam masyarakat. Bahkan dalam kondisi menjelang pemilihan umum dan sesudah pemilihan umum. Hal ini menjadi penting dikarenakan tidak jarang terjadi gesekan-gesekan baik pada level antar individu, organisasi dan juga bernegara yang akhirnya memicu munculnya potensi konflik vertikal ataupun horizontal.



Maka dari hasil pemilihan umum dan juga paparan tentang bagaimana fenomena *Post Truth* di atas, dapat dilihat bagaimana akhirnya stigma dan pandangan masyarakat Sumatera Barat terhadap sosok Joko Widodo dapat terlihat dari lini media sosial yang begitu cepat menyebarkan informasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai postingan di medsos yang di upload atau di unggah oleh masyarakat Sumatera Barat terhadap jalannya pemilihan umum.

Gambar 1.1.

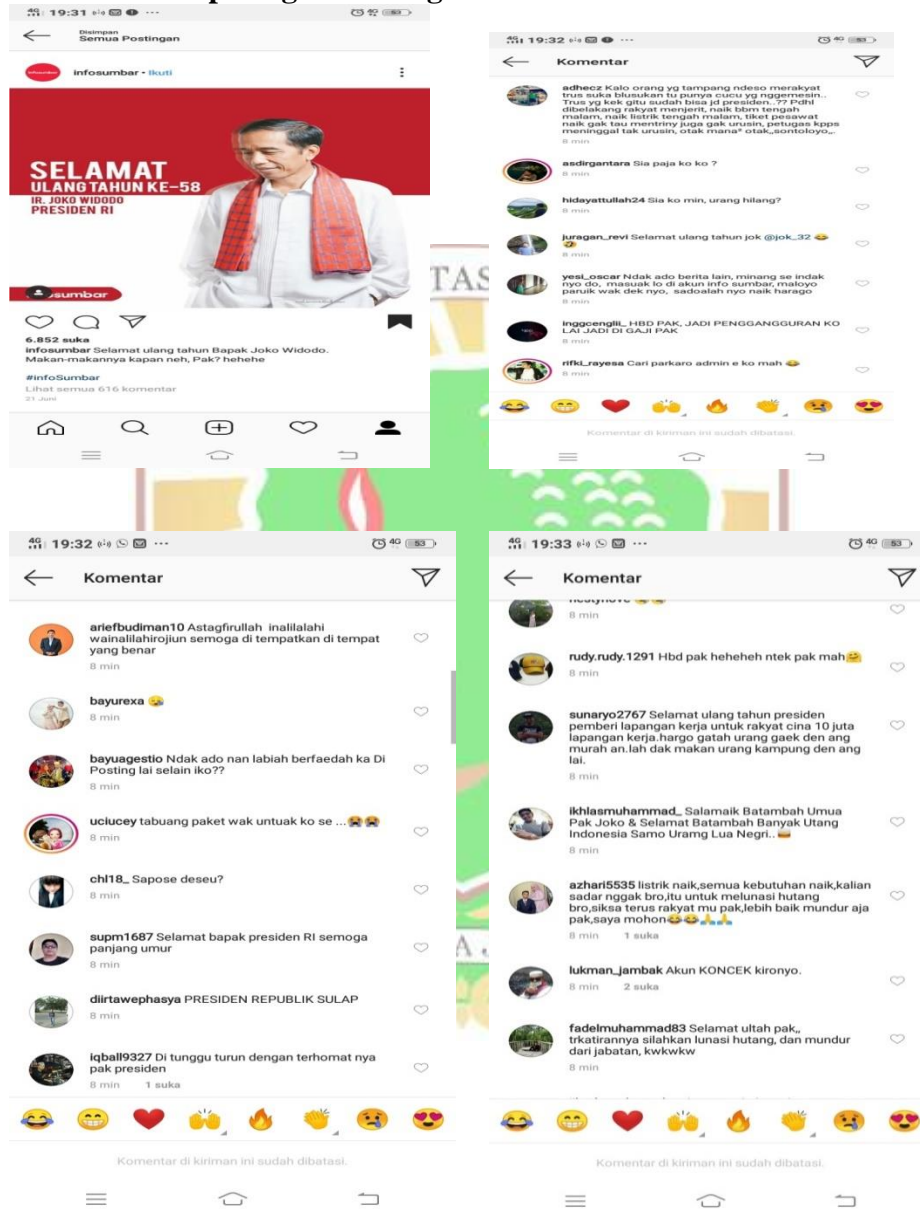
Unggahan Salah Satu Masyarakat (akun Drh Syahrizal) Sumatera Barat setelah Hasil Pemilihan Rekapitulasi Pemilihan Presiden 2019



Sumber : Akun Facebook Drh Syahrizal, diakses tanggal 16 November 2019, jam 16.55

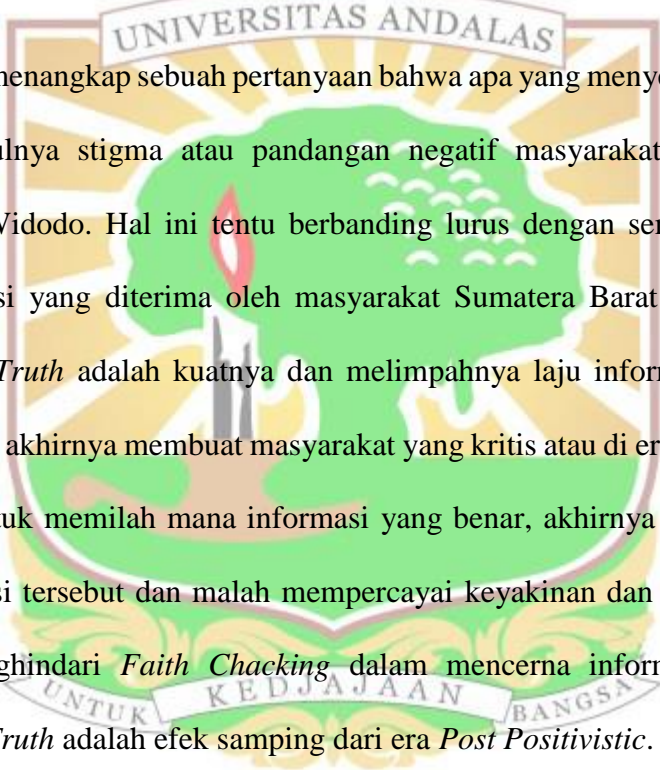


Gambar 1.2
Unggahan di salah satu laman media sosial Sumatera Barat (Info Sumbangar) yang mendapat komentar dari masyarakat Sumatera Barat mengenai peringatan ulang tahun Joko Widodo



Sumber: www.instagram.com//@infosumbangar.

Terlihat dari berbagai unggahan masyarakat Sumatera Barat di akun media sosial, dimana pandangan dan stigma masyarakat Sumatera Barat terhadap Joko Widodo sebagai presiden dan juga calon presiden terpilih di periode kedua di kolom komentar sangat negatif dan cenderung muncul ungkapan dan ujaran kebencian terhadap Joko Widodo, yang mana itu hanyalah unggahan ucapan ulang tahun dimana malah ditanggapi negatif oleh masyarakat Sumatera Barat.



Peneliti menangkap sebuah pertanyaan bahwa apa yang menyebabkan atau latar belakang munculnya stigma atau pandangan negatif masyarakat Sumatera Barat terhadap Joko Widodo. Hal ini tentu berbanding lurus dengan semakin banyaknya sumber informasi yang diterima oleh masyarakat Sumatera Barat dimana inti dari fenomena *Post Truth* adalah kuatnya dan melimpahnya laju informasi yang ada di masyarakat yang akhirnya membuat masyarakat yang kritis atau di era *Post Positivistik* kebingungan untuk memilah mana informasi yang benar, akhirnya mempertanyakan seluruh informasi tersebut dan malah mempercayai keyakinan dan emosionalitasnya saja, serta menghindari *Faith Chacking* dalam mencerna informasi dikarenakan fenomena *Post Truth* adalah efek samping dari era *Post Positivistic*.

Post Turth adalah suatu kondisi di mana emosi dan kepercayaan pribadi lebih banyak lebih penting dari pada fakta dalam membentuk opini publik. Maka dari itu fenomena *Post Truth* serta isu-isu mengenai hal tersebut dilihat sebagai sebuah wacana kepentingan serta menjelaskan realitas. Wacana yang di sampaikan dalam *Post Truth* mencakup cara berfikir, cara mengetahui dan menyatakan sesuatu. Hal ini tentu

berkaitan dengan hubungan antara argumen, pola pikir dan pengetahuan yang dijelaskan Foucault adanya berbagai macam perspektif, kepentingan dan kuasa yang berbeda dalam membentuk suatu subjek. Oleh karena itu terdapat beragam wacana yang membentuk pemikiran masyarakat umum.

Fenomena *Post Truth* sangat tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi dimana memiliki dampak yang sangat besar untuk pembentukan opini masyarakat Sumatera Barat. Bisa dilihat bahwa masyarakat Sumatera Barat adalah masyarakat yang sudah melek terhadap teknologi informasi terkhusus dengan sosial media dimana selama masa kampanye pemilihan presiden kemaren masyarakat Sumatera Barat cenderung aktif di media sosial untuk menyampaikan aspirasinya, tetapi yang terlihat adalah bahwa di media sosial masyarakat Sumatera Barat malah memiliki pandangan atau perspektif negatif terhadap Joko Widodo dan yang paling bisa dilihat bahwa masyarakat Sumatera Barat bahkan banyak yang mengamini berita-berita yang ada di media sosial atau media online yang bahkan belum dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya, bahkan menjurus kearah berita atau informasi yang tidak benar (hoax).

Sejumlah faktor memicu keoknya Sang Petahana dari Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Menurut pengamat politik Universitas Andalas, Padang, Edi Indrizal, Jokowi tertinggal jauh di Sumatera Barat pada Pilpres 2019 terkait masalah ideologi, sosiologis, kultural, hingga psikologis. “Semua faktor tersebut saling terkait

membentuk perilaku kolektif masyarakat dalam memilih”.¹¹ Karakteristik utama dari politik post-truth menurut Ali Imron adalah :

1. Mengaduk-aduk masyarakat dengan hal-hal yang bersifat emosional.
2. Mengabaikan data dan fakta.
3. Mengutamakan dan mem-viral-kan berita yang belum tentu kebenarannya atau palsu.
4. Mengkombinasikan gerakan populis dengan teori-teori konspirasi yang masih butuh diuji lagi kebenarannya
5. Mobilisasi narasi fiktif tentang figur atau peristiwa tertentu
6. Memoles ketidakjujuran dalam membangun opini untuk memperkuat posisi sosial figur, kelompok, atau kepentingan tertentu dalam masyarakat yang semakin terbiasa dalam peradaban televisual, online, android, dan media sosial.

Maka dalam fenomena *post truth* ini peneliti dapat juga merujuk dari berbagai penelitian yang telah ada mengenai pengaruh post truth yang mana kajian mengenai post truth adalah kajian sedang hangat di bahas di kalangan ilmuan sosial bahkan masyarakat umum dikarenakan fenomena ini bukanlah fenomena yang hanya terjadi di

¹¹ Sumber <https://katadata.co.id/berita/2019/04/23/faktor-pemicu-kekalahan-jokowi-di-sumatera>, di akses tanggal 20 Januari 2020 jam 20.32

Indonesia tetapi adalah rentetan dari fenomena yang ada di berbagai penjuru dunia. Beberapa penelitian telah membahas mengenai fenomena Post Truth yang mana memiliki fokus pembahasan yang berbeda-beda dan menggunakan sudut pandang atau perspektif yang berbeda pula dalam hal mengupas fenomena tersebut maka dari itu peneliti menjadikannya sebagai rujukan penelitian agar dapat menghasilkan novelty atau kebaruan dalam penelitian ini. pertama, penelitian dari journal of communication (Nyimak), 1 (1), 2017, yang ditulis oleh Eko Wahyono, Rizka Amalia dan Ikma Citra Ranteallo berjudul menelaah lebih dekat “Post Factual/Post Truth Politics, studi kasus brexit” (analsis resensi media) dimana menggunakan pendekatan atau metedologi studi kasus dan studi literature dimana membahas bagaimana kebenaran pada era post truth memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan dengan era sebelumnya dimana hal ini memiliki kaitan dengan bagaimana pemaknaan dan cara pandang terhadap fakta dimana akhirnya bercampur aduk dengan opini yang dilator belakangi oleh emosi dan emosionalitas yang tidak rasional. Dalam penelitian ini juga memperlihatkan bahwa dalam peristiwa keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa disebabkan oleh Tarik ulur pengaruh dari partai konservatif yang memiliki kecendrungan terhadap isu populis yang tak berdasar dari data dan fakta. Hal ini berkaitan dengan kebijakan keluarnya inggris dari uni eropa (BREXIT) dan apa yang menyebabkan hal tersebut. Tetapi yang menjadi hal yang luput dari penelitian jurnal ini menurut peneliti adalah darimana sumber pemaknaan kebenaran yang menyebabkan opini dan wacana populis ini bisa di dukung mayoritas masyarakat Britania Raya, maka dari itu peneliti ingin mengambil Novelty atau kebaruan dari

hal tersebut kedalam penelitian ini dengan objek konstelasi politik pemilihan presiden di Sumatera Barat.

Kedua adalah penelitian jurnal tabligh 20(1), 2019, sosiologi Universitas Gadjah Mada yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Jadmiko yang berjudul *post truth* media sosial dan misinformasi pergolakan wacana politik pemilihan presiden Indonesia 2019. Dimana jurnal ini membahas mengenai bagaimana konstelasi politik yang dihasilkan adalah perang wacana tanpa data dimana pertunjukan politik kacau ini dikarenakan perbedaan antara fraksi atau golongan yang saling menyebarkan kebohongan, kebencian dan omong kosong. Tetapi yang luput dari penelitian ini adalah bagaimana korelasi antara pemaknaan kebenaran dan dasar argumentasi dari fenomena Post Truth dan kebanyakan dari jurnal ini lebih mengulas tentang fenomena yang telah terjadi bukan bagaimana fenomena tersebut terjadi.

Ketiga adalah penelitian jurnal komunikasi Indonesia yang berjudul etika media di era post truth, dalam penelitian ini peneliti melihat bahwa bagaimana hubungan erat antara perkembangan teknologi informasi yang akhirnya menyebabkan munculnya fenomena banjir informasi, dikarenakan revolusi digital yang menghadirkan sejumlah dampak sosial. Penelitian ini mengedepankan mengenai dampak dari masifnya penyebaran informasi di masyarakat dan bagaimana dampaknya terhadap preferensi masyarakat, tetapi penelitian ini peneliti lihat tidak terlalu dalam membahas dampak fenomena Post Truth terhadap konstelasi politik.

Merujuk dari beberapa penelitian yang telah di jelaskan tadi maka peneliti melihat adanya kecendrungan yang sama di mana masyarakat Sumatera Barat sudah terkena fenomena *post truth*, hal ini tentu dipengaruhi bagaimana konstruksi berfikir masyarakat Sumatera Barat yang akhirnya dengan mudah mempercayai berita hoax serta berbagai macam turunan atau produk dari fenomena *post truth*. Maka dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa banyak hal yang akhirnya mempengaruhi cara pandang masyarakat Sumatera Barat terhadap sosok seorang Joko Widodo dan bahkan peneliti melihat ada sisi emosional yang mendasari bagaimana akhirnya masyarakat Sumatera Barat tidak menjatuhkan pilihan kepada Joko Widodo, hal ini sejalan dengan bagaimana konsep Post Truth dan juga fenomena Post Truth yang ada di masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi kebaruan atau novelty penelitian dimana mengarah ke aspek pengaruh fenomena Post Truth terhadap cara pandang masyarakat dalam hal konstilasi politik yang mana mengarah ke pengaruh perilaku memilih masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan bahwa bagaimana pengaruh *Post Truth* yang akhirnya mempengaruhi kekalahan Joko Widodo di pemilihan presiden tahun 2019 di Sumatera Barat. Hal ini semakin diperkuat dengan bagaimana kecendrungan masyarakat Sumatera Barat yang gencar menerima atau bahkan menyebarkan informasi terkait dengan bagaimana pandangan atau perspektif mereka terhadap sosok seorang Joko Widodo serta adanya unsur kecurangan yang ada

dalam pemilihan umum yang tentu sangat semarak di lini masa atau sosial media yang sebelumnya peneliti jelaskan di latar belakang.

Maka dari itu munculah pertanyaan peneliti apakah fenomena *Post Truth* memiliki pengaruh terhadap kekalahan Joko Widodo di Sumatera Barat di dua priode pemilihan presiden. Dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa pada Tahun 2014 pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berhasil menang telak di Sumatera Barat, dengan memperoleh 1.797.505 suara atau 76,9 persen. Rivalnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya memperoleh 539.308 suara atau 23,1 persen¹², dan pada Tahun 2019 pasangan Prabowo-Sandi menang telak 85,95%, sedangkan Jokowi-Ma'ruf 14,05%. Prabowo-Sandi memperoleh suara 2.488.733 sementara pasangan Jokowi-Amin mendapat 407.761.¹³ Bahkan hasil pemilihan presiden ini didapatkan hasil bahwa suara Joko Widodo malah lebih rendah 11 persen dari hasil pemilu sebelumnya.

Tabel 1.1
Perolehan Suara Pemilihan Presiden di Sumatera Barat 2014

| NO | Pasangan Calon | Jumlah Suara | Presentase Suara (%) |
|-----------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Prabowo Subiant-Hatta Rajasa | 1.797.505 Suara | 76,9 % |
| 2 | Joko Widodo-Jusuf Kalla | 539.308 Suara | 23,1 % |

Sumber : www.kpu.go.id diakses tanggal 13 November 2019, jam 20.35 wib

¹² www.KPU.go.id diakses Tanggal 13 November 2019, Jam 20.15 wib

¹³ www.KPU.go.id diakses Tanggal 13 November 2019, Jam 20.35 wib

Tabel 1.2
Perolehan Suara Pemilihan Presiden di Sumatera Barat 2019

| NO | Pasangan Calon | Jumlah Suara | Presentase Suara (%) |
|-----------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Joko Widodo-Maaruf Amin | 2.488.733 Suara | 85,95% |
| 2 | Prabowo Subianto-Sandiaga Uno | 407.761 Suara | 14,05 % |

Sumber : www.kpu.go.id diakses tanggal 13 November 2019, jam 20.35 wib

Sedangkan hasil pemilihan presiden secara nasional tahun 2019 adalah dari 34 provinsi hasil rekapitulasi ini ditetapkan melalui keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden pasangan Nomor urut 01 unggul dengan perolehan 85.607.362 atau 55,50 persen. Sementara, perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

Tabel 1.3
Tabel Perolehan Suara Pemilihan presiden 2019

| NO Urut | Pasangan Calon | Jumlah Suara | Presentase Suara (%) |
|----------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Joko Widodo-Maaruf Amin | 85.607.362 Suara | 55,50% |
| 2 | Prabowo Subianto-Sandiaga Uno | 68.650.239 Suara | 44,50 % |

Sumber : www.kpu.go.id diakses Tanggal 13 November 2019, Jam 20.45 wib

Hal ini juga menarik dimana Joko Widodo setelah kalah pada pemilihan presiden 2014 di Sumatera Barat memiliki intensitas yang tinggi untuk melakukan kunjungan ke Sumatra Barat, bahkan melakukan sholat Idul Fitri di masjid raya Sumatera Barat¹⁴. Maka dari itu tentu ada upaya dari Joko Widodo untuk mendapatkan suara yang lebih baik di Sumatera Barat, hal ini juga terlihat dengan diselenggarakannya kampanye akbar di mana sejumlah kepala daerah dan grup musik Slank hadir serta terlibat di dalamnya. Tetapi hal yang dapat peneliti lihat adalah bahwa hasil dari pemilihan presiden 2019 di Sumatera Barat tetap saja menghasilkan hasil yang sama dengan pemilihan umum 2014, dimana Jokowi dinyatakan kalah bahkan lebih telak dari hasil pemilihan presiden sebelumnya.

Hal ini diperparah dengan adanya deklarasi kepala daerah di Sumatera Barat yang menyatakan mendukung Joko Widodo dan Maaruf Amin pada pemilihan presiden dimana terdapat 12 kepala daerah di Sumatera Barat yang mendeklarasikan diri mendukung Joko Widodo dan Maaruf Amin. Dari upaya-upaya diatas dapat peneliti lihat tentu akan membantu perolehan suara Joko Widodo di Sumatera Barat, tetapi kenyataannya tetap saja kalah dengan signifikansi yang sangat besar.

Maka pada poin tersebut peneliti menangkap sebuah pertanyaan penelitian bahwa apa yang menyebabkan atau latar belakang munculnya stigma atau pandangan negatif masyarakat Sumatera Barat terhadap Joko Widodo. Menurut Asrinaldi bahwa

¹⁴ Sumber <https://www.cnnindonesia.com/nasional/menakar-kekalahan-telak-jokowi-dari-prabowo-di-sumatra-barat>, di akses Tanggal 13 November 2019 Jam 21,00

falsafah 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah' atau ABS-SBK merupakan salah satu variabel yang menyebabkan kegagalan Jokowi meraup suara lebih banyak di Pilpres 2019. Berbagai gagasan atau pemikiran dari orang-orang di sekitar Joko Widodo justru melahirkan rasa antipati dari masyarakat Sumatera Barat untuk memilih capres berstatus petahana. Falsafah ABS-SBK, dalam konteks ini warga Sumatera Barat mempraktikkan '*reliugius feeling*'¹⁵. Akhirnya dapat dilihat bahwa sosok seorang Joko Widodo adalah sosok yang dikelilingi kelompok multikultur, agama, pemikiran plural. Namun label isu PKI terlanjur membuat warga Sumatera Barat antipati terhadap Jokowi.

Hal yang menarik dalam fenomena Post Truth yang dapat kita lihat adalah berdasarkan data dan hasil survey SMRC menunjukkan bahwa penggunaan isu kebangkitan PKI selama pemilihan presiden masih menjadi jualan politik yang menarik dan memercayainya dimana dari data tersebut menunjukkan bahwa 12,6 persen responden adalah orang-orang yang tergolong aktif di media sosial dan secara rutin menerima informasi dari media internet hal ini disampaikan oleh direktur SMRC Sirojudin Abbas. Dari data tabulasi silang menggunakan preferensi partai politik menunjukkan bahwa masyarakat yang percaya terhadap kebangkitan PKI kebanyakan merupakan pemilih PKS (37 persen) Gerindra (20 Persen) dan PAN (18

¹⁵Perasaan dapat diartikan sebagai pengalaman kondisi seseorang dalam mengetahui dan berkeinginan, atau sebagai tindakan orang yang secara mendasar bersatu dalam hal ini adalah tindakan yang berkaitan dengan keagamaan. Tetapi sejak Tetens dan Kant, itu juga telah diartikan sebagai fungsi ketiga, tidak dapat direduksi menjadi kognisi dan perjuangan.

Peren) yang unik dalam data tersebut adalah mereka yang percaya PKI bangkit justru berusia dibawah 21 tahun. Temuan ini memperlihatkan bahwa isu ini merupakan hasil mobilisasi opini kekuatan politik dengan menggunakan media internet atau media sosial. Data ini akhirnya menarik adalah kaitannya dengan fenomena yang peneliti jelaskan sebelumnya.

Selain itu dapat dilihat dari yang telah peneliti paparkan di latar belakang penelitian bagaimana tanggapan atau pandangan masyarakat Sumatera Barat terhadap Joko Widodo di media sosial, bagaimana pandangan dan stigma masyarakat Sumatera Barat terhadap Joko Widodo sebagai presiden dan juga calon presiden terpilih di priode kedua di kolom komentar sangat negatif dan cenderung muncul ungkapan dan ujaran kebencian terhadap Joko Widodo.

Maka dalam hal ini peneliti melihat atau berasumsi bahwa banyak hal yang akhirnya mempengaruhi cara pandang masyarakat Sumatera Barat terhadap sosok seorang Joko Widodo dan bahkan peneliti melihat ada sisi emosional yang mendasari bagaimana akhirnya masyarakat Sumatera Barat tidak menjatuhkan pilihan kepada Joko Widodo, hal ini sejalan dengan bagaimana konsep *Post Truth* dan juga fenomena *Post Truth* yang ada di masyarakat. Hal ini tentu bukan tanpa alasan karena bisa dilihat dari bagaimana tanggapan masyarakat Sumatera Barat terhadap Joko Widodo di sosial media yang cenderung negatif. Peneliti melihat hal ini sebagai dampak dari berbagai aspek yang akhirnya mengkonstruksi pandangan masyarakat Sumatera Barat ke arah

fenomena *Post Truth*. Ada berbagai aspek yang peneliti lihat yang akhirnya mempengaruhi munculnya fenomena *post truth* di masyarakat Sumatera Barat.

Maka dari itu peneliti ingin melihat lebih jauh tentang:

1. Bagaimana fenomena *post truth* memiliki pengaruh terhadap kekalahan Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 di Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menjelaskan serta menganalisis apakah ada pengaruh *Post Truth* terhadap kekalahan Joko Widodo di pemilihan presiden 2019 di Sumatera Barat .

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Secara Akademis
 - a. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep *Post Truth* dan implikasinya terhadap konsolidasi demokrasi. Serta menjelaskan novelty penelitian ini mengenai mengapa *Post Truth* muncul dan mampu mempengaruhi kekalahan Joko Widodo di pemilihan presiden di Sumatera Barat.

- b. Menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami masalah yang berkaitan dengan konsep *Post Truth* dalam tataran pemilu.

2) Secara Praktis

- a. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru yang baik bagi mahasiswa tentang *Post Truth* dalam tataran kehidupan mahasiswa, terutama dalam pembahasan *Post Truth* di area konstelsi politik yang sebagaimana banyak terjadi belakangan ini.
- b. Serta menjadi pembelajaran bagi semua bahwa *Post Truth* merupakan gangguan dan duri tajam dalam demokrasi dan seharusnya ini tidak terjadi dalam proses Pemilu.

